

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih fundamental, seperti pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses terhadap pendidikan, dan penguatan sistem layanan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Proses pembangunan yang ideal harus mampu membawa perubahan menyeluruh yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana penelitian oleh Wintardi (2020), keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus dilihat dari kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penduduk (Wintardi, 2020). Salah satu ukuran penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini memadukan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup, pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Menurut Muslihatinningsih dkk. (2023), IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan pembangunan manusia dibandingkan hanya mengandalkan indikator ekonomi makro seperti PDRB atau pertumbuhan ekonomi semata (Banase & Purwono, 2024).

Meski secara umum pembangunan di Provinsi Jawa Timur mengalami kemajuan, kenyataannya masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Wilayah Tapal Kuda, yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi, masih tertinggal dibandingkan kawasan lain seperti Surabaya Raya dan Malang Raya. Aisyah Ayu Rahmanillah (2016) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM di Tapal Kuda, namun alokasi pada sektor pendidikan dan infrastruktur belum memberikan dampak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan pembangunan manusia di kawasan tersebut (Rahmanillah, 2016). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Setyowati & Solihin (2024) menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) mengungkapkan bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di Tapal Kuda masih belum optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk meningkatkan IPM melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan terarah (Aghitsni & Busyra, 2022).

Kondisi tersebut menjadi alasan penting perlunya kajian mendalam mengenai pembangunan manusia di wilayah Tapal Kuda. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi IPM, otoritas lokal dapat Merancang strategi kebijakan yang sesuai sasaran guna mempercepat pembangunan manusia dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Studi ini diharapkan mampu menggambarkan secara ringkas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan capaian IPM, sehingga dapat menjadi rujukan strategis dalam pemerataan pembangunan di Jawa Timur (Muslihatinningsih et al., 2023).

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat menjadi aset berharga bagi pembangunan jika didukung oleh kualitas yang memadai. Konsep ini berlandaskan pada pemahaman bahwa manusia berperan sebagai pelaku, penggerak, sekaligus penerima manfaat dari pembangunan. Jika kualitas sumber daya manusia rendah, maka perannya cenderung lebih dominan sebagai penerima manfaat dibandingkan sebagai penggerak atau pelaksana pembangunan. Belakangan ini, diskusi mengenai pentingnya pengembangan sumber daya manusia semakin sering muncul. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin luas bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai faktor utama dalam mewujudkannya. Selain itu, mulai disadari pula bahwa pembangunan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam semata (BPS, 2017).

Selain jumlah penduduk dan kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menjadi faktor yang memengaruhi pembangunan manusia. Pengangguran yang tinggi menunjukkan masih banyaknya angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja, sehingga produktivitas masyarakat tidak optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pendapatan rumah tangga, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pada akhirnya menghambat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut penelitian Putera (2024), jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di wilayah Gerbangkertosusila. Studi ini menegaskan bahwa semakin tinggi angka pengangguran, semakin besar pula potensi kesenjangan sosial dan ekonomi yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor

ekonomi produktif menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas pembangunan manusia (Putera, 2024).

Perdebatan mengenai indikator pembangunan sosial-ekonomi telah berlangsung sejak lama. Pendapatan per kapita yang awalnya dijadikan sebagai tolok ukur pembangunan mulai dipertanyakan oleh para ahli ekonomi maupun di luar bidang ekonomi karena dinilai kurang akurat. Hal ini mendorong lahirnya berbagai indikator baru yang lebih berfokus pada aspek pembangunan secara menyeluruh. Moris (1979) mengembangkan *Physical Quality of Life Index* (PQLI), sementara *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang kini banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Konsep IPM ini dikembangkan berdasarkan gagasan Haq (1996) dan pertama kali diperkenalkan oleh UNDP dalam *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian diterbitkan secara berkala setiap tahun. Dalam laporan tersebut, pembangunan manusia didefinisikan sebagai *a process of enlarging people's choices*, yakni suatu proses yang bertujuan memperluas pilihan hidup masyarakat. Tiga aspek utama yang menjadi tolok ukur dalam pembangunan manusia mencakup harapan hidup yang lebih panjang dan sehat, tingkat pendidikan yang layak, serta standar hidup yang memadai. Selain itu, UNDP juga menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*) (Setiawan & Hakim, 2008).

Menurut Effendi (1991), dimensi sumber daya manusia mencakup jumlah, komposisi, karakteristik (kualitas), serta persebaran penduduk. Keempat aspek ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain hubungan antara jumlah dan

kualitas yang telah dibahas sebelumnya, komposisi dan distribusi penduduk juga memainkan peran penting. Apabila tingkat ketergantungan penduduk tinggi ditandai dengan banyaknya jumlah penduduk usia tidak produktif, maka upaya pengembangan sumber daya manusia akan menghadapi berbagai tantangan. Hal yang sama juga berlaku jika penduduk dengan kualitas unggul hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, karena hal ini dapat memperlebar kesenjangan dalam pembangunan. Terdapat beberapa pendekatan dalam pengembangan sumber daya manusia, salah satunya adalah pendekatan mutu modal manusia (*human capital*). Dalam pendekatan ini, manusia memegang peranan yang sangat penting dalam proses produksi, di samping modal (uang), sumber daya alam, dan teknologi (BPS, 2017).

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat yang berguna dalam menilai keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Di Indonesia, IPM mengalami peningkatan yang cukup pesat, namun masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar kesejahteraan masyarakat dapat merata di seluruh wilayah. Kebijakan serta program yang berfokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang lebih baik tetap menjadi faktor utama dalam mendorong pembangunan manusia yang lebih berkualitas di masa mendatang. Meskipun IPM nasional menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antarwilayah di berbagai pulau di Indonesia. Kesenjangan ini berpengaruh terhadap akses serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Walaupun angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, persoalan terkait kualitas pendidikan masih

menjadi tantangan di banyak daerah, terutama yang masih menghadapi kendala infrastruktur serta keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, meskipun pendapatan masyarakat cenderung meningkat, ketimpangan ekonomi tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Distribusi kekayaan yang tidak merata dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Efendi et al., 2024).

Gambar 1. 1: Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik

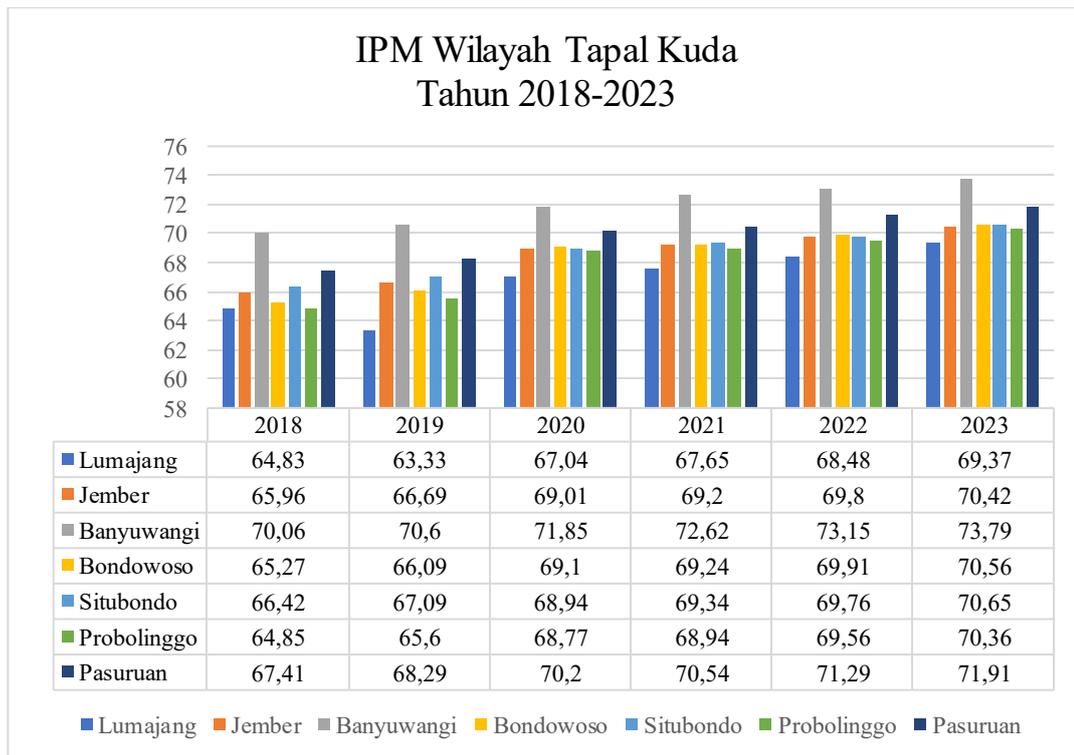
Berdasarkan grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023, terdapat perbedaan nilai IPM antarprovinsi. Provinsi dengan nilai IPM tertinggi umumnya berada di Pulau Jawa, dengan DKI Jakarta menempati peringkat teratas dengan nilai mendekati 83, disusul oleh DI Yogyakarta yang mencapai sekitar 81. Angka tersebut mencerminkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik di kedua wilayah tersebut, yang kemungkinan besar didukung oleh akses pendidikan yang luas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta perekonomian yang lebih maju. Selain itu, provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, juga menunjukkan angka IPM yang relative tinggi, berkisar antara

75 hingga 80. Hal ini menandakan bahwa ketiga provinsi tersebut juga memiliki perkembangan yang cukup baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh beberapa komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran Per Kapita Riil yang telah disesuaikan. Namun, selain faktor-faktor tersebut, terdapat elemen pendukung lain yang turut memengaruhi IPM, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Rasio, dan Upah Minimum Regional. Analisis terhadap faktor-faktor ini sangat diperlukan untuk mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat pembangunan manusia, sehingga dapat mengidentifikasi kabupaten atau kota yang masih tertinggal dalam pencapaian IPM. Dalam beberapa tahun terakhir, IPM di Indonesia terus mengalami peningkatan. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan IPM tertinggi, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan daerah lain. Sementara itu, IPM Jawa Timur menunjukkan tren kenaikan setiap tahun dan telah masuk dalam kategori tinggi dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya. Berdasarkan data infografis BPS Jawa Timur tahun 2022, IPM provinsi ini tercatat sebesar 74,05. Pada tahun 2023, angka tersebut meningkat sebesar 0,6 persen menjadi 74,65 sehingga tetap berada dalam kategori tinggi. (Hartanto et al., 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi ini mencapai angka tertentu yang menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, IPM Jawa Timur masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas hidup

masyarakat di Provinsi Jawa Timur. IPM di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kinerja ini juga lebih tinggi di bandingkan provinsi besar lainnya di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39). Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan manusia tetapi juga menunjukkan daya saing Jawa Timur dalam konteks pembangunan Nasional. Secara keseluruhan, peningkatan IPM di Jawa Timur mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan manusia yang terintegrasi. Namun, disparitas antarwilayah di dalam provinsi masih menjadi tantangan utama. Wilayah-wilayah di Tapal Kuda, seperti Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang, cenderung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur seperti Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) maupun wilayah Mataraman di bagian timur seperti Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pendukung yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Upaya untuk menyelesaikan kesenjangan ini perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan mendatang.

Gambar 1. 2: IPM Wilayah Tapal Kuda



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan grafik diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir di setiap kabupaten, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Kabupaten Banyuwangi mencatat angka IPM tertinggi dibandingkan daerah lainnya, meningkat dari 70,06 pada tahun 2018 menjadi 73,79 pada tahun 2023. Sementara itu, kabupaten lain juga mengalami kenaikan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Pertumbuhan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Sejumlah faktor turut berkontribusi terhadap peningkatan ini, seperti meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan, bertambahnya jumlah serta kualitas sekolah, serta pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Kabupaten Banyuwangi dan Pasuruan, misalnya, mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan daerah lainnya,

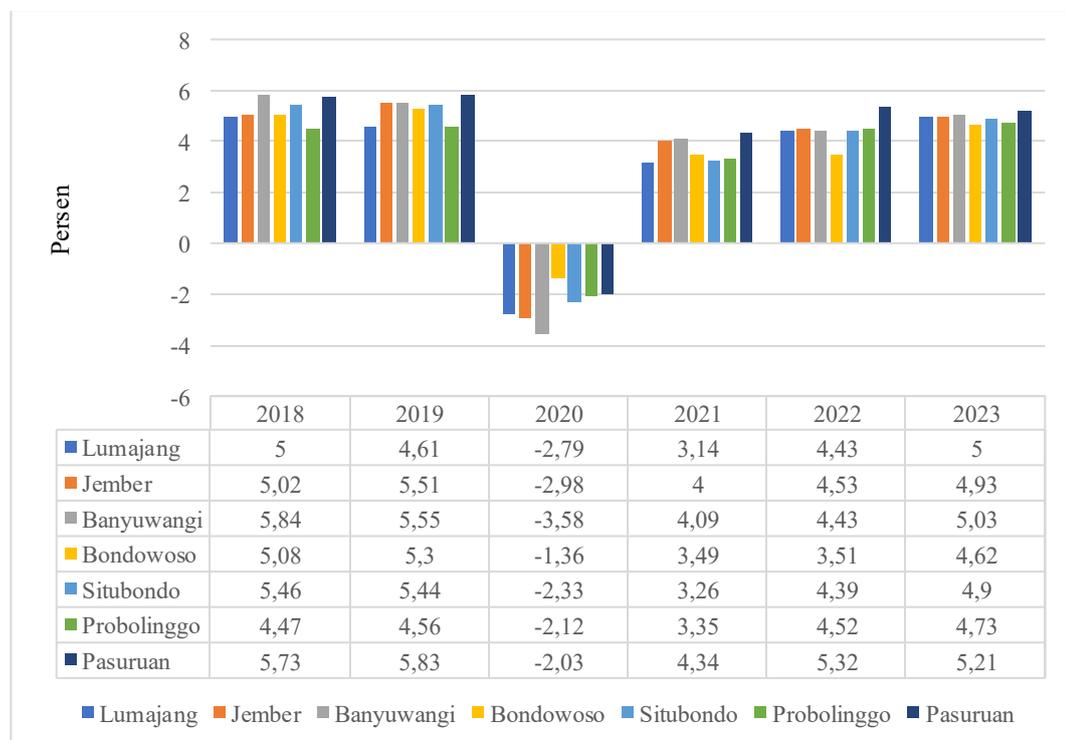
yang kemungkinan dipengaruhi oleh infrastruktur yang lebih baik serta dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan, karena beberapa daerah masih tertinggal dibandingkan yang lain. Kabupaten seperti Bondowoso dan Situbondo mengalami pertumbuhan IPM yang lebih lambat, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan. Dengan demikian, meskipun secara keseluruhan terjadi kemajuan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tapal Kuda masih perlu ditingkatkan.

Wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur yang mencakup Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, dan Pasuruan, memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Fenomena ini disebabkan oleh kesenjangan pembangunan antara bagian barat dan timur Jawa Timur, di mana kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo berkembang lebih pesat dibandingkan wilayah Tapal Kuda yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan (BPS, 2023). Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya IPM di wilayah ini adalah tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari angka partisipasi sekolah yang belum optimal serta tingginya angka putus sekolah. Selain itu, budaya pernikahan dini dan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini (Jayani, 2021).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda. Beberapa daerah masih menghadapi kekurangan

tenaga medis, minimnya fasilitas kesehatan, serta tingginya angka stunting dan gizi buruk, terutama di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo (BPS, 2023). Tingginya angka kemiskinan turut berkontribusi terhadap rendahnya IPM, di mana sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian tradisional yang memiliki produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak stabil (Wintardi, 2012). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri, karena wilayah Tapal Kuda masih sangat bergantung pada sektor pertanian, sementara sektor industri dan jasa belum berkembang secara optimal. Kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan yang buruk serta minimnya investasi, juga menjadi hambatan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2023).

Gambar 1. 3: Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tapal Kuda



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di wilayah Tapal Kuda mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019, hampir seluruh daerah mencatat pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan kisaran antara 4% hingga 5,84%. Namun, tahun 2020 menjadi periode sulit akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan tajam di semua kabupaten. Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Pasuruan mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam dengan angka pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing sebesar -3,58%, -2,13%, dan -2,03%. Setelah perlambatan ekonomi pada tahun 2020, kondisi mulai membaik pada tahun 2021, meskipun pertumbuhan ekonomi yang tercapai masih lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Pada tahun 2022 dan 2023, ekonomi di wilayah Tapal Kuda menunjukkan pemulihan yang lebih stabil, dengan pertumbuhan berkisar antara 4% hingga 5%. Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2023, dengan angka lebih dari 5%, sementara daerah lainnya juga mengalami peningkatan yang relatif merata. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Tapal Kuda terdampak cukup besar akibat pandemi, tetapi berhasil pulih dalam beberapa tahun terakhir. Pemulihan sektor industri, perdagangan, dan pertanian berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Ke depan, diperlukan kebijakan yang mendukung investasi, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Tapal Kuda.

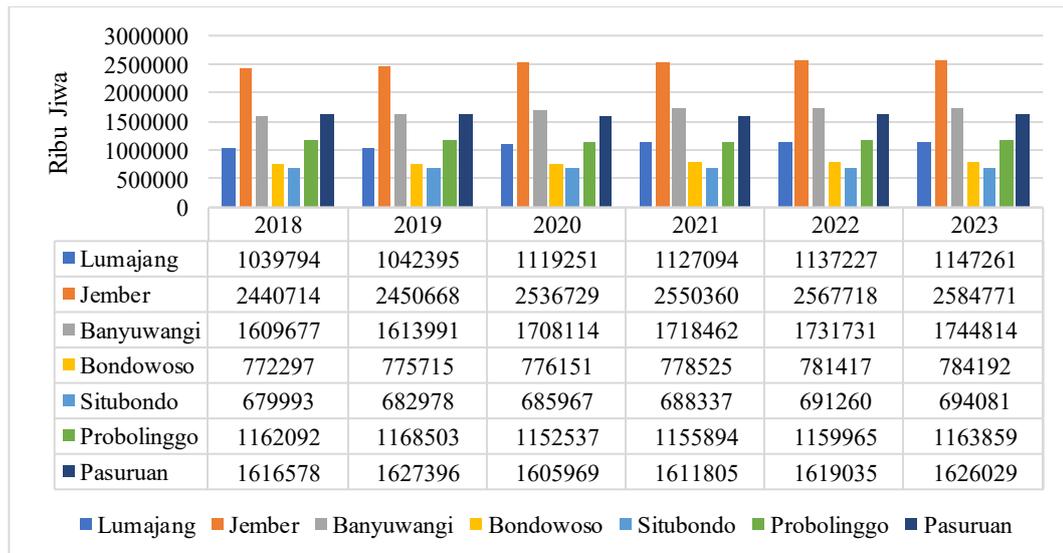
Menurut Sadono (2010), peningkatan produksi dan jasa di suatu negara terjadi akibat perkembangan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti konstruksi, infrastruktur, pendidikan, dan barang

modal. Pertumbuhan ekonomi sendiri diukur berdasarkan selisih antara aktivitas ekonomi dalam satu tahun dengan tahun berikutnya. Dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Khadijah et al., 2022). Wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangannya. Secara umum, struktur ekonomi di wilayah ini masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Meskipun wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sektor-sektor tersebut masih menghadapi kendala, seperti tingkat produktivitas yang rendah, ketergantungan pada metode pertanian tradisional, serta kurangnya penerapan inovasi dan teknologi dalam proses produksinya (Wintardi, 2012).

Selain sektor pertanian, sektor industri dan jasa mula mengalami perkembangan, khususnya di wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur dan pasar. Namun, pertumbuhan sektor ini belum merata di seluruh wilayah Tapal Kuda. Beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam hal investasi, akses permodalan, serta keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, konektivitas antarwilayah juga menjadi faktor krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur transportasi yang belum memadai kerap menghambat distribusi barang dan jasa sehingga mengurangi efisiensi perdagangan (BPS, 2024). Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk memberikan tantangan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan akan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan semakin meningkat. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang tepat, hal ini dapat menghambat peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi di sektor industri, serta penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah Tapal Kuda (Antara, 2023).

Gambar 1. 4: Jumlah Penduduk Wilayah Tapal Kuda



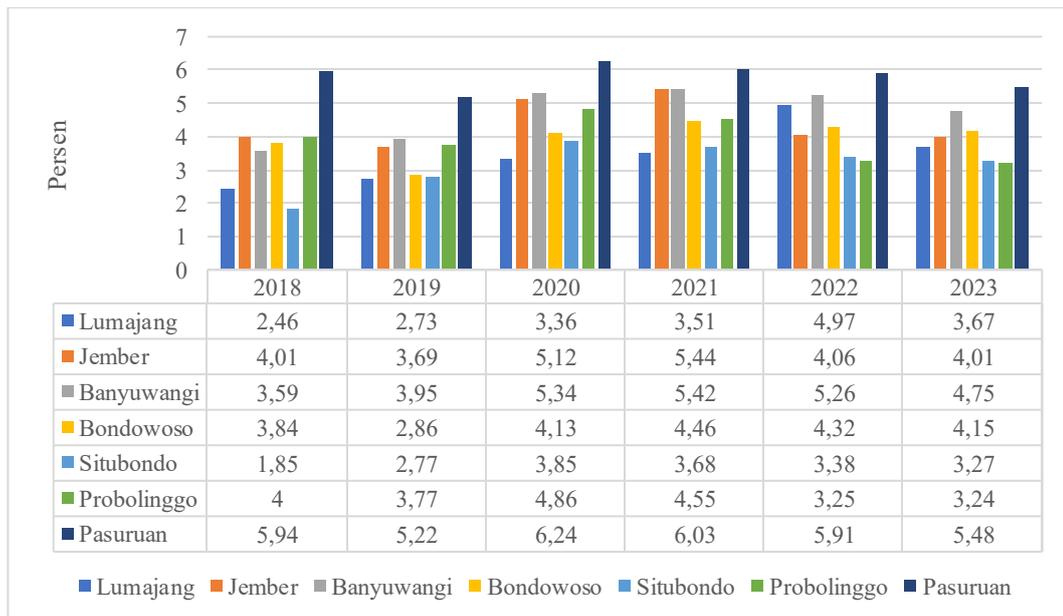
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dalam grafik jumlah penduduk di wilayah Tapal Kuda, terlihat bahwa setiap kabupaten mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kabupaten Jember mencatat jumlah penduduk tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya, dengan angka yang terus meningkat, dari sekitar 2,4 juta jiwa pada tahun 2018 hingga lebih dari 2,58 juta jiwa pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Jember merupakan daerah dengan populasi terbesar di kawasan Tapal Kuda. Sementara itu, kabupaten Bondowoso dan Situbondo memiliki jumlah penduduk paling sedikit, berkisar antara 690 ribu hingga 780 ribu jiwa. Meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan kabupaten lain, pertumbuhan penduduk di kedua daerah ini tetap mengalami peningkatan secara

bertahap. Kabupaten lainnya, seperti Lumajang, Banyuwangi, Probolinggo, dan Pasuruan juga menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Bertambahnya jumlah penduduk di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kelahiran yang tinggi, perpindahan penduduk (migrasi), serta perkembangan ekonomi di masing-masing daerah. Dengan adanya pertumbuhan populasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah di wilayah Tapal Kuda perlu menyiapkan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan yang muncul. Upaya seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta pengembangan infrastruktur yang memadai menjadi hal yang sangat penting guna memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dan terus meningkat.

Selain jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga memiliki peran signifikan dalam memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). TPT menunjukkan persentase tenaga kerja yang belum berhasil memperoleh pekerjaan. Angka pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada penurunan pendapatan keluarga, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta menurunnya kualitas hidup secara umum. Ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan komponen utama IPM, yakni usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak. Di wilayah Tapal Kuda, yang masih banyak bergantung pada sektor informal dan pertanian tradisional, tingginya TPT diduga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya nilai IPM di beberapa daerah. Oleh karena itu, variabel TPT layak dipertimbangkan dalam kajian pembangunan manusia secara lebih menyeluruh (Zakaria, 2018).

Gambar 1. 5: Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Tapal Kuda



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar grafik tersebut menggambarkan dinamika tingkat pengangguran terbuka di tujuh kabupaten wilayah Tapal Kuda selama periode 2018 hingga 2023. Secara umum, terdapat fluktuasi tingkat pengangguran di seluruh kabupaten yang diamati. Kabupaten Pasuruan menunjukkan kecenderungan memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 6,24 persen. Di sisi lain, Kabupaten Situbondo cenderung memiliki tingkat pengangguran terendah, meskipun tetap mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Peningkatan tajam tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun 2020 di sebagian besar kabupaten kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi. Pasca tahun 2020, tren tingkat pengangguran mulai menurun secara bertahap, walaupun belum kembali ke kondisi pra-pandemi. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan

bahwa permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan yang signifikan di wilayah Tapal Kuda, terutama dengan adanya disparitas antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat dan berkelanjutan guna mengurangi tingkat pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Tapal Kuda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS PERNGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur?
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek berikut. Lingkup wilayah mencakup Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Situbondo. Lingkup variable terdiri dari variable independent yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lingkup waktu penelitian ini mencakup rentang waktu sepuluh tahun terakhir untuk memberikan gambaran tren yang lebih akurat terhadap hubungan antara variable yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan IPM di wilayah Tapal Kuda.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam aspek akademis, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat umum.

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, demografi, dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di wilayah Tapal Kuda. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi IPM di daerah tertentu, serta menyediakan data empiris yang relevan sebagai bahan kajian akademik.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Tapal Kuda. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap kualitas pembangunan manusia, yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kependudukan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka dalam mendukung pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai berbagai tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tapal Kuda. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan guna menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah masing-masing.